

SISTEM MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ZAINI IBRAHIM

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
deni_zaini@yahoo.com

Abstract

In many economic literatures, economy is divided into two sectors, real sector which covers service market and goods market, and monetary sector which consists of money market and equity market.

In a part of economic system, monetary that runs in a country will affect the economic rate. Monetary economy can be applied in a policy, called monetary policy. In a conventional discussion, a monetary policy is run in order to reach the increase of national income, to stabilize market price, and to control the inflation rate. To get the goal of that macro-economy, the interest rate is used, in which it becomes the weakness of conventional monetary system. The use of interest rate, furthermore, has caused the economic crisis, indeed global financial crisis.

In term of new economic system needs, Islamic monetary system offers a solution to overcome financial crisis. The offered system is asset based transaction, free of interest, avoidance of transactions containing speculation (maisir) and uncertainty (gharar). Moreover, it also uses stable currencies, i.e. dinar and dirham.

Keyword: *Monetary system, interest rate, fiat money, dinar, dirham.*

Abstrak

Di berbagai literature tentang ekonomi, ekonomi terbagi dalam dua sector: sector real yang mencakup pasar jasa dan pasa barang-barang, dan sektor moneter yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal (kekayaan).

Dalam sebagian sistem ekonomi, moneter (keuangan) yang mengalir di sebuah Negara akan mempengaruhi laju ekonomi. Ekonomi moneter bisa diaplikasikan dalam sebuah kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Dalam suatu pembahasan konvensional, sebuah kebijakan moneter dijalankan untuk mencapai peningkatan pendapatan nasional, untuk menstabilkan harga pasar, dan mengontrol laju inflasi. Untuk memperoleh tujuan ekonomi makro tersebut, suku bunga digunakan di mana hal tersebut menjadi kelemahan dari

system moneter konvensional. Penggunaan suku bunga selanjutnya sudah menyebabkan krisis ekonomi, bahkan krisis keuangan global.

Berkaitan dengan kebutuhan system ekonomi baru, system moneter Islam menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi krisis keuangan. System yang ditawarkan adalah transaksi berdasarkan asset, bebas bunga, menghindari transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Selanjutnya, ia juga menggunakan mata uang yang stabil, yaitu dinar dan dirham.

Kata Kunci: *Sistem Moneter, Suku Bunga, Dinar, Dirham.*

Pendahuluan

Di negara manapun perkembangan ekonomi saling terkait dengan aspek kehidupan lain misalnya politik, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perkembangan politik dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan di sebuah lembaga bisnis.

Sebagai contoh peristiwa yang relatif belum lama berlalu, yaitu pemilihan presiden Indonesia tahun 2009. Bagi sebagian pelaku ekonomi di pasar uang dan modal sangat berkepentingan dengan siapa presiden yang akan terpilih, karena pasar akan langsung memberikan reaksi baik positif maupun negatif. Ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi presiden, para pelaku pasar memberikan reaksi yang positif. Tetapi kemudian pada saat susunan kabinet diumumkan justru pasar bereaksi negatif. Ternyata tim ekonomi yang dipilih SBY tidak sesuai dengan harapan para pelaku ekonomi. Dampaknya, mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Tidak lama kemudian rupiah kembali stabil setelah SBY melakukan *reshuffle* terhadap menteri ekonominya.

Dari fenomena tersebut, bisa dilihat bahwa sistem moneter Indonesia, bahkan dunia, sesungguhnya sangat rentan terhadap berbagai gejolak. Hal ini disebabkan sektor moneter selalu berkaitan dengan transaksi-transaksi yang bersifat jangka pendek dan spekulatif. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk sedikit memberikan ulasan mengenai sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam.

Sistem Moneter Konvensional

Pembahasan di bagian ini dititikberatkan pada rancang bangun sistem moneter konvensional yang terdiri dari dua komponen, yaitu kebijakan dan instrumen moneter yang digunakan, serta penggunaan sistem mata uang. Di bagian akhir, rancang bangun sistem moneter konvensional tersebut diulas dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Kebijakan dan Instrumen Moneter Konvensional

Sistem moneter konvensional bersumber pada teori permintaan uang yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936). Keynes mengemukakan bahwa permintaan uang didorong atas motif untuk keperluan transaksi, menghadapi masa depan (berjaga-jaga), dan untuk kebutuhan mencari penghasilan dengan cara membeli surat berharga (obligasi). Teori ini masih diadopsi hingga kini dengan berbagai koreksi.

Pada prinsipnya sistem moneter mengupayakan terciptanya kondisi makro ekonomi yang mencakup pada pertumbuhan ekonomi, terjaganya stabilitas harga, dan tingkat inflasi yang dapat dikontrol. Upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang beredar, khususnya *base-money* (uang kartal).

Jika kondisi perekonomian mengalami inflasi tinggi, maka langkah moneter yang diambil adalah dengan berupaya mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Langkah ini biasa dikenal dengan sebutan kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya adalah jika bank sentral berkepentingan untuk menambah jumlah uang beredar, dengan maksud merangsang kegiatan ekonomi masyarakat, maka langkah yang ditempuh adalah kebijakan moneter ekspansif.

Dua kebijakan moneter tersebut bisa berjalan dengan menggunakan instrumen tingkat suku bunga. Instrumen tingkat suku bunga bisa dalam bentuk pelelangan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), atau dalam bentuk penggunaan fasilitas diskonto (*discount rate facility*), serta bisa juga dalam bentuk kewajiban simpanan cadangan di rekening bank sentral (*reserve requirement*).

Persoalannya, apakah setiap kebijakan yang dikeluarkan akan selalu berjalan efektif mengatasi masalah perekonomian? Tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Menurut Pohan,¹ ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan moneter. Yang pertama adalah *Natural Rate Hypothesis*. Menurut hipotesis ini kebijakan moneter hanya efektif dalam jangka pendek dan menjadi tidak efektif untuk jangka panjang. Sedangkan teori kedua adalah *Rational Expectation Hypothesis* yang menilai

kebijakan moneter tidak efektif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Misalnya bank sentral melakukan ekspansi moneter dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat. Kenaikan pengeluaran konsumsi pada umumnya akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Bagi produsen, kenaikan harga tersebut akan memberikan keuntungan tambahan karena margin keuntungan yang diterima menjadi semakin besar. Dengan keuntungan yang semakin besar, produsen akan terdorong meningkatkan produksinya. Selanjutnya, produsen akan berusaha memperoleh tambahan tenaga kerja dengan memberikan upah yang lebih tinggi agar masyarakat bersedia menawarkan tenaganya lebih banyak. Walaupun kenaikan upah yang ditawarkan pengusaha tidak sebesar kenaikan harga, atau upah riil menurun, masyarakat tetap bersedia menawarkan tenaganya lebih banyak karena mereka merasa bahwa upah yang mereka terima meningkat (*money illusion*). Dengan demikian, kebijakan ekspansi moneter sangat efektif dalam usaha meningkatkan kegiatan produksi dan memperluas kesempatan kerja.

Jika dilihat dengan pendekatan *Natural Rate Hypothesis*, efektivitas ekspansi moneter tersebut hanya efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kegiatan produksi dan kesempatan kerja yang semula meningkat dan meluas akan kembali menurun sampai ke tingkat semula. Hal ini disebabkan dalam jangka panjang masyarakat mulai sadar bahwa upah riil yang diterima sebenarnya mengalami penurunan karena kenaikan upah nominal lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Setelah kondisi *money illusion* ini disadari, masyarakat akan bersedia lagi menawarkan tenaganya lebih dari tingkat semula. Kalaupun kaum pekerja berhasil menuntut upah nominal yang lebih tinggi dan bahkan sama besarnya dengan kenaikan harga-harga, kenaikan upah ini akan mematikan usaha produsen untuk meningkatkan produksinya karena profit margin yang awalnya meningkat kembali menurun sampai ke tingkat semula.

Sebaliknya jika dikaji dengan menggunakan teori *Rational Expectation Hypothesis*, kebijakan ekspansi moneter tidak akan berdampak efektif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena masyarakat menyadari bahwa walaupun secara nominal upah meningkat, secara riil upah tidak mengalami kenaikan. Apabila upah riil tidak berubah, masyarakat tidak bersedia meningkatkan penawaran tenaganya sehingga kebijakan moneter tidak akan

membawa dampak perluasan produksi, tetapi justru hanya mengakibatkan inflasi. Produsen juga sadar bahwa kenaikan harga barang-barang produksi mereka tidak akan memberikan suatu keuntungan tambahan karena ongkos produksi, terutama tenaga kerja juga mengalami kenaikan yang sama besarnya.

Pembahasan mengenai *Rational Expectation Hypothesis* akhir-akhir ini menjadi topik perdebatan di kalangan ekonom. Sebagian dari ekonom tidak percaya bahwa masyarakat akan begitu pandai dan jeli dalam mengamati perkembangan situasi ekonomi dan moneter dan melakukan tindakan antisipasi sehingga tidak memberikan peluang sedikitpun bagi bank sentral untuk memperbaiki keadaan perekonomian.

Sebaliknya, ekonom yang mendukung teori ini percaya bahwa dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan akan mendorong masyarakat untuk memberikan respon terhadap kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh bank sentral sehingga segala kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral tidak akan ada manfaatnya karena telah diantisipasi oleh masyarakat.

Transparansi dan komunikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan moneter. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral seluruh dunia mengakui pentingnya transparansi dan strategi komunikasi ke masyarakat. Banyak bank sentral memberikan estimasi tentang tingkat inflasi dan keadaan perekonomian yang menjadi dasar bagi kebijakan moneter.

Paling tidak ada tiga faktor yang terkait pentingnya transparansi dan komunikasi dalam kebijakan moneter.² Pertama adalah kemandirian bank sentral. Makin besar kemandirian bank sentral, semakin tinggi akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas berarti bank sentral melakukan kegiatan komunikasi intensif, menjelaskan arah, dasar pengambilan keputusan dan tindakan terkait kebijakan moneter.

Kedua, penerapan konsep kerangka kerja target inflasi (*Inflation Targeting Framework/ITF*). ITF adalah sebuah konsep pengendalian inflasi yang menekankan pentingnya komunikasi kebijakan moneter ke publik. Sehingga diharapkan kebijakan moneter bank sentral untuk mencapai tingkat inflasi ideal bisa dipahami publik.

Ketiga, makin berkembangnya pasar finansial di banyak negara. Perkembangan ini kebanyakan didasarkan ekspektasi terhadap perkembangan ekonomi di suatu negara, di masa yang akan

datang, termasuk tingkat inflasi dan tingkat suku bunga bank sentral, yang memang dikenal sebagai instrumen efektif.

Sejak awal abad XX, sejarah krisis ekonomi dunia (baik krisis mata uang, krisis utang, krisis perbankan, krisis nilai tukar, maupun krisis pasar saham) sudah begitu panjang. Dimulai dari depresi besar di AS pada tahun 1930-an, krisis utang di Amerika Latin pada awal 1980-an, krisis kredit properti di Jepang tahun 1980-an juga. Ada lagi krisis pinjaman Amerika tahun 1989-1991, dilanjutkan krisis nilai tukar Eropa tahun 1992-1993, serta krisis nilai tukar Asia 1997-1998 dan krisis mata uang Rusia tahun 1998. Di awal abad XXI terjadi krisis perbankan di Argentina tahun 2001, serta terakhir yang sekarang masih dirasakan adalah krisis finansial yang dipicu oleh kredit macet di AS. Krisis ekonomi yang berurutan tersebut menyisakan dampak bagi perekonomian dunia yang semakin luas dan dalam.³

Jika ditarik benang merahnya, krisis ekonomi selalu dipicu oleh masalah yang terjadi di sektor moneter. Dalam sektor moneter atau di pasar uang dan modal selalu terdapat informasi asimetris, yaitu keadaan di mana salah satu pihak yang bertransaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Salah satu jenis pasar keuangan adalah pasar kredit. Pihak debitur (peminjam) sudah pasti memiliki informasi lebih banyak tentang investasi mereka dibandingkan pihak bank sebagai pemberi kredit. Keadaan ini memunculkan fenomena *adverse selection* dan *moral hazard* di pasar uang. Krisis keuangan walaupun dengan banyak faktor penyebab yang saling tumpang tindih dan bersilangan akan selalu berpusat pada informasi asimetris. Pasar uang dan modal dipenuhi oleh instrumen, baik obligasi maupun saham, yang tidak diketahui secara pasti kualitasnya. Bahkan, harga saham pada kondisi normal pun belum tentu mencerminkan nilai fundamentalnya. Dengan kondisi seperti ini, tentu seharusnya pemerintah dan atau otoritas moneter melakukan intervensi agar kondisi stabilitas moneter terjaga. Namun, intervensi pemerintah ini bertentangan dengan doktrin ekonomi liberal.⁴

Jika dilihat dari sisi manajemen risiko, gejala yang terjadi di pasar uang dan modal tidak lepas dari kegagalan pelaku bisnis keuangan dan perbankan konvensional dalam mengelola manajemen risiko. Diperbolehkannya penggunaan instrumen derivatif yang penuh spekulatif untuk membiayai ekspansi bisnis dalam sistem keuangan konvensional, semakin memperbesar dampak krisis keuangan. Kegagalan lembaga keuangan mengelola risiko kredit bisa menjadi pemicu krisis finansial. Risiko kredit adalah potensi kerugian suatu lembaga keuangan yang

disebabkan oleh ketidakmampuan debitur melunasi kredit. Krisis finansial global yang terjadi baru-baru ini akibat tindakan yang salah dari lembaga keuangan di AS dalam memberikan kredit kepada debitur yang tidak layak dibiayai. Mereka tidak mempunyai penghasilan tetap dan jelas, tapi mendapat kucuran kredit. Padahal dalam konsep manajemen risiko dan diperkuat prinsip Basel II, pemberian kredit harus memperhatikan kemampuan debitur melaksanakan kewajiban pelunasan.⁵

2. Sistem Mata Uang Konvensional

Penulis mengutip sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ascarya, seorang peneliti senior Bank Indonesia (BI).⁶ Dalam penelitian yang dilakukan selama rentang waktu 2002 sampai medium 2008 diperoleh sebuah kesimpulan bahwa suku bunga memainkan peran paling dominan terhadap laju inflasi di Indonesia dengan kontribusi sebesar 54,7 persen. Fakta ini cukup mengejutkan, mengingat selama ini *interest rate* menjadi instrumen terpenting pengendalian moneter dalam sistem kapitalis. Selain suku bunga, besarnya kontribusi volatilitas nilai tukar mata uang (*exchange rate*) juga menjadi kontributor terbesar kedua terhadap kenaikan inflasi dengan sumbangan sebesar 23,2 persen. Sejak ditinggalkannya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, kebijakan kurs mengambang bebas dan inflasi menjadi masalah ekonomi makro yang sulit dipecahkan. Masa keemasan *Bretton Woods* merupakan masa yang paling stabil dalam sejarah. Di mana kesejahteraan masyarakat meningkat, investasi meningkat, serta volume perdagangan antarnegara ikut pula melonjak. Selain itu, upah juga meningkat 80 persen, sehingga stabilitas ekonomi internasional terjaga.

Sistem Bretton Woods adalah bentuk sistem moneter dengan standar tukar emas yang pernah digunakan sebagai sistem moneter internasional selama setengah dekade (1944-1971). Kesepakatan yang ditandatangani oleh utusan 46 negara yang bertemu dalam pertemuan pembentukan sistem moneter internasional baru pasca perang dunia II disebut kota kecil yang bernama Bretton Woods (New Hampshire AS) ini bertujuan untuk mempertahankan harga emas secara baku, yakni 35 dolar AS per ons emas. Sedangkan negara-negara lain diwajibkan membakukan nilai tukar mata uang mereka terhadap dolar, yang berarti secara implisit mereka juga membakukan nilai tukar mata uangnya terhadap emas.

Ide konferensi ini lahir akibat besarnya dampak Perang Dunia I yang menghasilkan situasi ekonomi dunia pada era 1920-an dan 1930-an yang sangat sulit dan bermuara pada depresi ekonomi

berat pada 1929 dan seterusnya. Banyak yang mengalami defisit neraca pembayaran, inflasi, pendapatan nasional menurun, pengangguran naik, dan perdagangan dunia menurun.

Namun karena mengalami defisit anggaran, membuat AS kehilangan banyak emas dan menurunkan kemampuannya dalam menjaga konvertibilitas dolar ke emas. Akhirnya pada Agustus 1971 bank sentral AS melakukan demonetisasi emas yang menandai berakhirnya sistem Bretton Woods. Sejak itu dunia menganut standar kertas yang sepenuhnya tidak memiliki keterkaitan dengan emas.⁷

Setelah dolar AS tidak di *back up* oleh emas, maka saat ini dolar dibebaskan bergerak sesuai dengan mekanisme pasar, tidak tergantung lagi pada kontrol dan penyediaan cadangan emas. Keistimewaan dolar AS sebagai mata uang dunia dan penyimpanan cadangan devisa tetap berlaku sehingga AS mendapat keuntungan dapat mencetak dolar berapa pun kebutuhannya dan tidak perlu membayar bunga dan tidak mengalami risiko selisih kurs.⁸

Sistem Moneter Islam

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan moneter yang diambil bank sentral bertujuan untuk mengatasi inflasi, mengontrol nilai tukar mata uang, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah yang diambil otoritas moneter dapat berupa menetapkan tingkat suku bunga, baik secara langsung atau tidak melalui operasi pasar, atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengidentikkan bunga dengan riba. Mungkinkah kebijakan moneter dapat berjalan tanpa instrumen suku bunga? Inilah pertanyaan yang selalu disampaikan dalam beberapa forum diskusi ekonomi Islam.

1. Kebijakan dan Instrumen Moneter Islam

Kebijakan moneter sebenarnya mampu dijalankan tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Hal ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Perekonomian di Jazirah Arab ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Bila para pedagang melakukan ekspor barang, berarti mereka pun sesungguhnya sedang mengimpor dinar atau dirham. Sebaliknya, jika mereka mengimpor barang, berarti dinar atau dirham yang diekspor. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar uang adalah *derived market* dari keseimbangan pasar barang dan jasa.⁹

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau kebijakan defisit anggaran. Islam mengajarkan supaya mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Yang menjadi faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkannya transaksi pinjaman *qard*, sedekah, dan kerjasama bisnis dalam bentuk *mudharabah*.¹⁰

Menurut Merza Gamal, yang merujuk pada pendapat al-Ghazali, bahwa orang yang menimbun uang berarti telah berbuat kriminal, karena menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu.¹¹

Teori permintaan uang yang dikembangkan al-Ghazali memiliki banyak persamaan dengan *Quantity Theory of Money* yang belakangan muncul dan dikemukakan oleh aliran monetaris seperti Irving Fisher dan Milton Friedman. Inti pemikiran kaum monetaris menyatakan bahwa jumlah nominal penghasilan negara sama dengan kecepatan sirkulasi uang dikalikan dengan uang yang ada dalam ekonomi. Karena itu dapat dilihat secara matematis bahwa makin cepat beredar uang dalam ekonomi, makin tinggi penghasilan nasional dan pada gilirannya rakyat akan semakin makmur. Sebaliknya, jika uang ditahan dari sirkulasi, maka roda ekonomi makin melambat dan terjadilah stagnasi dalam ekonomi. Berarti kebijakan moneter yang sedang dijalankan adalah kebijakan moneter kontraktif.¹²

Seperti layaknya sebuah sistem hasil rekayasa manusia, sistem moneter konvensional yang telah dijelaskan di atas ternyata banyak menyimpan masalah. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat delapan faktor yang menjadi sumber penyimpangan dari sistem moneter konvensional.¹³ Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama uang. Dalam teori ekonomi saat ini uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpan nilai kekayaan (*store of value*). Dengan penggunaan uang kertas, fungsi uang sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai sudah gugur. Karena uang kertas yang sekarang berlaku nilainya selalu berubah disebabkan adanya inflasi. Ajaran ekonomi Islam mereduksi fungsi uang hanya sebagai alat tukar

dan satuan hitung. Mata uang yang digunakan harus bisa menjamin kestabilan nilai.

Faktor kedua adalah penggunaan *base-money targeting* sebagai kerangka kebijakan moneter. *Base-money targeting* atau pengendalian uang kartal sebagai instrumen kebijakan moneter disandarkan pada teori kuantitas uang. Efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada stabilitas perputaran uang beredar (*velocity stability*). Kebijakan pengendalian *base-money* sangat tidak tepat karena nilai uang saat ini cenderung berfluktuasi. Ekonomi Islam menawarkan untuk mencari alat moneter yang menjamin kestabilan, maka emas dan perak dipilih sebagai instrumen moneter dalam Islam.

Faktor ketiga adalah stabilitas kurs mata uang tergantung pada tingkat inflasi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang secara umum. Dalam hal ini, bank sentral selaku otoritas moneter memiliki kemampuan memengaruhi tekanan inflasi yang bersumber dari tingginya permintaan. Langkah yang bisa ditempuh di antaranya dengan menggunakan tiga instrumen, suku bunga, kredit perbankan, dan ekspektasi. Jika ketiga instrumen tersebut berkaitan dengan *riba*, *syubhat*, *maisyr*, dan *gharar*, maka ini tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Faktor keempat berkaitan dengan faktor ketiga di atas, yaitu penggunaan suku bunga sebagai instrumen moneter *signaling*. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam tidak memungkinkan penetapan suku bunga sebagai target atau sasaran operasional. Fakta menunjukkan bahwa instrumen suku bunga tidak cukup mampu untuk menstabilkan nilai uang dan moneter.

Faktor yang kelima lahir karena adanya ketergantungan mata uang lokal terhadap mata uang negara lain sebagai acuan. Misalnya, saat ini naik turunnya mata uang rupiah selalu disandingkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebagai *hard currency*. Apabila dolar AS mengalami gejolak, maka mata uang lain akan terpengaruh.

Faktor yang keenam menunjukkan bahwa kenyataan saat ini uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar, tapi juga sebagai komoditas perdagangan dan ditarik bunga dari setiap transaksi peminjaman/penyimpanan uang. Konsekuensinya, uang dijadikan alat spekulasi. Faktor ketujuh, dalam konsep ekonomi Islam uang harus mencerminkan sektor riil. Jika ada yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti telah mengurangi jumlah uang beredar yang berdampak melambatnya roda perekonomian. Untuk kasus di Indonesia, tindakan penimbunan uang justru dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menyerap dana melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyimpannya.

Kemudian faktor yang terakhir dilihat dari aspek kelembagaan. Bank sentral tidak mempersoalkan adanya entitas individu. Hal ini berbeda dengan ekonomi Islam yang objeknya kepada *mukallaf* secara individual.

Adapun fenomena resesi ekonomi yang sekarang masih dapat dirasakan, sesungguhnya dapat diatasi dengan pendekatan sistem keuangan syariah. Bachrul Ilmi mengemukakan bahwa sistem keuangan syariah bisa menjadi solusi atas krisis keuangan global. Ada dua alasan yang mendasari pendapatnya.¹⁴ Pertama, sistem keuangan syariah hanya membolehkan penyaluran kredit atau pembiayaan bila memang ada aset yang dijadikan dasar transaksi (*underlying*). Alasan kedua, sistem keuangan Islami tidak memperbolehkan adanya instrumen derivatif (turunan). Kalaupun diperbolehkan seperti halnya yang terjadi di Malaysia dan Timur Tengah, hanya untuk upaya lindung nilai (*hedging*) atas risiko nilai tukar dalam transaksi pembiayaan ekspor impor (*trade finance*), bukan untuk mencari untung. Untuk kasus di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) belum mengizinkan transaksi derivatif.

Penyebab utama dari krisis keuangan global yaitu salah dalam menyalurkan kredit. Dalam konteks perbankan syariah harus dipastikan bahwa transaksi didasarkan pada aset yang jelas. Islam melarang transaksi pembiayaan yang hanya didasarkan pada sekuritisasi tanpa kejelasan aset. Sehingga bila debitur mengalami gagal bayar (*default*), bank tidak menderita risiko besar karena transaksi didasarkan pada aset yang ada dan bisa dijual sebagai pelunasan kewajiban.¹⁵

Adiwarman menambahkan satu alasan lagi bahwa dalam sistem moneter Islam transaksi valas dibatasi hanya dalam bentuk *spot*. Prinsip ini mencegah perdagangan uang yang akan memicu spekulasi. Transaksi *forward* dan *swap* dalam valas, apalagi transaksi *futures*, akan membuat setiap pelakunya membuat prediksi kurs sehingga kurs tidak lagi ditentukan pada nilai tukar objektifnya. Tidak adanya pembatasan *hedging* untuk kebutuhan transaksi riil mendorong volume *hedging* jauh lebih besar dari kebutuhan sebenarnya. Perdagangan instrumen *hedging* telah mengubah tujuan awalnya untuk berlindung dari gejolak kurs menjadi tujuan mengambil keuntungan dari gejolak kurs.¹⁶

Kembali pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ascarya, dikemukakan bahwa determinan inflasi dalam sistem moneter konvensional berupa uang fiat, suku bunga, *fractional reserve*, dan *exchange rate* menyumbang 81,4 persen inflasi di Indonesia. Menariknya, bila instrumen tersebut diganti dengan determinan inflasi dalam sistem moneter Islam, berupa *profit and loss sharing* (PLS) *return*, penawaran uang (*money supply*), dan *single global currency*, total

hanya menyumbang inflasi sebesar 5,1 persen. Penerapan *PLS return* untuk menggantikan *interest rate* akan mengurangi tingkat inflasi sebesar 51,8 persen. Sementara bila *exchange rate* diganti dengan *single global currency* maka akan menguransi inflasi sebesar 22,9 persen. Dengan demikian, solusi jangka pendek yang mesti dilakukan adalah memperbesar pembiayaan berbasis hasil di lembaga keuangan syariah. Sementara dalam jangka panjang, otoritas moneter disarankan melakukan peralihan instrumen moneter dari *interest rate* ke *PLS return based*.¹⁷

Hal yang penting juga dipikirkan yaitu upaya mereformasi sistem mata uang yang dijalankan saat ini. Uang fiat terbukti berdampak pada instabilitas nilai tukar yang kemudian menciptakan masalah inflasi.

2. Sistem Mata Uang Islam

Persamaan fungsi uang antara sistem moneter Islam dan konvensional yaitu terletak pada pemanfaatan uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai aset. Perbedaannya terletak pada motif untuk kebutuhan spekulasi, yang mengubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.

Sistem moneter konvensional yang selama ini berjalan tidak menciptakan stabilitas ekonomi karena tidak adanya kesamaan nilai tukar, dan terjadinya fluktuasi nilai tukar setiap saat. Setiap negara menggunakan berbagai jenis mata uang agar bisa melakukan perdagangan internasionalnya, satu mata uang untuk ekspor, satu untuk impor, dan satu lagi sebagai mata uang domestiknya.

Reformasi terhadap sistem moneter dunia yang lebih adil sulit dilakukan karena permasalahan moneter berkaitan dengan unsur politik dan kekuatan ekonomi. Dalam sistem moneter saat ini, AS sebagai negara adidaya bisa memperoleh keuntungan yang besar dengan hanya mencetak dan mengedarkan mata uang dolarnya di pasar internasional.

Dengan kondisi sistem moneter dan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan tersebut, sudah seharusnya merumuskan kembali sebuah sistem moneter dan perekonomian yang ditopang oleh sebuah mata uang yang stabil dan lebih adil. Salah satu rekomendasi yang paling signifikan adalah penggunaan mata uang dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang internasional.

Selama masa penggunaannya, dinar dan dirham dinilai lebih stabil dan memiliki tingkat inflasi dan fluktuasi yang lebih sedikit

dibandingkan dengan uang fiat. Kestabilan daya beli kedua mata uang ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَعْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ^ط
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتَعْتُوا
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِّكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal mu kepada seorang pun.” (QS. Al-Kahfi:19)¹⁸

Ada juga ayat Al-Qur'an yang menyebutkan Dinar sebagai mata uang terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 75 sebagai berikut:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ
تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.

Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya." (QS. Ali Imran:75)¹⁹

Dinar dan dirham berperan untuk mempermudah perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan, seperti spekulasi, fluktuasi nilai tukar yang tajam, dan berbagai hambatan lainnya. Penerapan dinar dan dirham dalam perdagangan internasional tidak berarti menggantikan peran mata uang domestik. Uang domestik tetap diperlukan dan dipergunakan sebagai alat transaksi dalam negeri.²⁰

Sistem moneter dalam doktrin Islam diambil dari riwayat pada zaman Rasulullah SAW yang menggunakan *bimetallic standard*, yaitu penggunaan emas dan perak (dinar & dirham) sebagai alat pembayaran yang sah. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah relatif stabil dengan kurs dinar-dirham 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai kurs bisa terganggu bila terjadi *disequilibrium supply and demand*.

Emas dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia sudah dikenal sejak periode sebelum masehi. Tepatnya 40000 tahun SM ditemukan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol yang digunakan oleh *paleolithic man*. Dalam sejarah lain disebutkan ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno (Circa) 3.000 tahun SM. Barulah digunakan dalam bentuk uang dimulai pada zaman Raja Lydia (Turki) pada 700 SM. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut dikenal sebagai *barbarous relic*.²¹

Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham merupakan mata uang perak warisan peradaban Persia.²² Mata uang dinar mengandung emas 22 karat, dan terdiri dari pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar. Pecahan yang lebih kecil didapat dengan cara memotong uang, misalnya memotong dua karat dari dinar. Mata uang dirham terdiri atas beberapa pecahan, *nash* (20 dirham), *nawat* (5 dirham), dan *sha'ira* (1/60 dirham).²³

Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi, yaitu: (1). *The gold coin standard*, di mana emas digunakan secara aktif sebagai alat pembayaran; (2). *The gold bullion standard*, emas hanya digunakan sebagai parameter dalam menentukan jumlah uang beredar oleh otoritas moneter; dan (3). *The gold exchange standard (Bretton Woods System)*, yaitu emas mulai digunakan oleh otoritas moneter sebagai *back-up* untuk memperkuat nilai tukar antara uang lokal dengan uang asing.

Di masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab pernah mencoba menjadikan kulit unta sebagai bahan pembuat uang.

Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penggunaan bahan uang selain dari emas dan perak akan menyebabkan hilangnya emas dan perak itu sendiri dari peredaran, sesuai dengan apa yang disebut sebagai *Hukum Gresham*, yaitu *bad money driven out good money*. Sebagai contoh pernah terjadi pada masa Bani Mamluk. Pada saat itu uang logam yang beredar terbuat dari fulus (tembaga), dan rasio antara emas dengan fulus adalah 1:20 (satu emas sebanding dengan 20 fulus). Sedangkan di daerah lain rasio yang berlaku adalah 1:25. Maka emas yang berada di daerah Mamluk akan dibawa ke daerah lain dan ditukar dengan 25 fulus, tentu saja perbedaan nilai ini akan mengakibatkan emas di peredaran akan hilang. Imam Ghazali membolehkan penggunaan uang yang tidak dikaitkan dengan emas dan perak selama pemerintah mampu menjaga nilainya.

Keunggulan dari penggunaan mata uang dinar dan dirham di antaranya adalah peredarannya tidak tergantung pada kebijakan pemerintah, karena dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik 100 persen. Ini akan menghindari terjadinya inflasi akibat kelebihan uang beredar. Selain itu, dinar dan dirham juga akan diterima masyarakat tanpa perlu memikirkan aspek legalitas. Misalnya, jika masyarakat dihadapkan pada dua pilihan, ingin dibayar dengan uang kertas atau dinar, tentu masyarakat akan lebih memilih dinar karena kestabilan nilainya. Keunggulan lain bila bertransaksi dengan menggunakan dinar akan mengurangi biaya transaksi. Bila dinar digunakan sebagai mata uang tunggal dunia Islam, maka biaya untuk menukar uang dari satu jenis mata uang ke mata uang lainnya dalam dunia Islam tidak diperlukan lagi. Penggunaan dinar juga akan lebih menjamin kedaulatan negara dari dominasi ekonomi, budaya, politik dan kekuatan asing. Sebagai contoh, dengan hanya mencetak dolar tanpa perlu di-*back up* oleh emas dan kemudian dipinjamkan ke Indonesia, AS kini dengan mudah mendikte dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.²⁴

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan kondisi moneter di Indonesia, mungkinkah Indonesia menerapkan kebijakan moneter tanpa bunga? Menurut Antonio Syafi'i, kebijakan moneter berbasis mata uang dinar dan dirham mungkin saja dapat diterapkan. Namun, kondisi ini tergantung pada tujuh faktor. Yaitu sosialisasi, dasar syariah, dasar hukum, dasar moneter, kesiapan infrastruktur industri pengguna dinar, perjanjian antar negara pengguna dinar, dan banyaknya masyarakat pengguna dinar. Saat ini di Indonesia baru dilakukan tahapan sosialisasi dan pembahasan dasar syariah, serta masih dikaji dasar hukumnya. Sedangkan, lima tahapan sisanya

belum dilakukan. Karena itu, penerapan dinar-dirham sebagai alat transaksi akan memakan waktu cukup lama. Kondisi serupa juga terjadi pada saat penerapan mata uang Euro sebagai mata uang sejumlah negara Eropa membutuhkan waktu sekitar 35 tahun, yang meliputi sosialisasi dan penyamaan standarisasi keuangan antarnegara, pembentukan lembaga moneter regional, dan peluncuran Euro. Proses paling lama adalah sosialisasi dan standarisasi sistem keuangan antar negara.²⁵

Dalam berbagai diskusi, wacana penerapan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi sudah mulai digulirkan. Metode yang ditempuh dengan coba meniru langkah yang digagas Uni Eropa dalam hal kesepakatan penggunaan mata uang Euro. Secara garis besar ada tiga tahapan yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan dinar-dirham sebagai alat transaksi perdagangan internasional.²⁶ Tahap pertama pembentukan pasar bersama. Tahap ini bisa diawali dari pembangunan kawasan sesama negara-negara Islam. Pembentukan kawasan bebas perdagangan bisa dirintis dari sub-sub regional, seperti di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara sehingga akan memudahkan tahapan integrasi berikutnya. Hubungan perdagangan ini diharapkan saling menguntungkan dan mengoptimalkan keunggulan sumber daya dan produksi masing-masing negara.

Keberpihakan sangat penting dalam mengutamakan produk dan jasa dari anggota sekutu perdagangan ini karena selama ini belum optimal. Perdagangan sesama negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) hanya sekitar 12 persen dari total semua perdagangan negara OKI. Total perdagangan OKI hanya tujuh persen dari total perdagangan dunia. Padahal, sekitar 60 persen sumber daya alam di dunia ini berada di negara-negara muslim. Kondisi ini tidak terlepas dari masih sedikitnya perdagangan sesama negara OKI dan besarnya ketergantungan terhadap perdagangan dengan negara-negara non muslim.

Tahap yang kedua, pasar bersama dalam bentuk perdagangan dan investasi membutuhkan keberpihakan aliran dana-dana Islam yang dimiliki investor muslim. Kenyataan menunjukkan bahwa dana surplus milik investor muslim terutama dari negara-negara timur tengah belum mengalir ke dunia Islam. Seharusnya ada komitmen bersama sesama pengusaha muslim untuk memprioritaskan berinvestasi di negara Islam.

Penggunaan dinar dan dirham oleh semua negara muslim dan menjadikannya sebagai mata uang tunggal (*monetary union*) akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap persatuan dan kesatuan serta pertumbuhan perdagangan negara-negara muslim.

Tahapan yang terakhir yang harus dilaksanakan adalah sesama negara muslim perlu segera membangun sistem keuangan Islam yang terintegrasi, baik perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan syariah lainnya. Diperlukan sebuah penguatan dari aspek pendanaan dan peran *Islamic Development Bank* (IDB) sebagai *World Bank*-nya dunia Islam. Selain itu, dibutuhkan juga sebuah lembaga Dana Moneter Islam Internasional, semacam IMF, yang skema pembiayaannya bebas bunga. Dengan demikian integrasi sistem perekonomian akan semakin kokoh.

Penutup

Pokok bahasan mengenai sistem moneter tidak terlepas dari dua elemen yang terkait di dalamnya, yaitu instrumen moneter dan sistem mata uang. Titik lemah dari sistem moneter konvensional terletak pada penggunaan instrumen tingkat suku bunga dan uang kepercayaan (*fiat money*). Penggunaan dua instrumen ini menimbulkan *multiplier effect* yang bermuara pada berbagai macam krisis ekonomi.

Sedangkan sistem moneter yang ditawarkan ajaran Islam ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas. Pertama, larangan terhadap praktik riba, spekulasi, dan judi, serta permintaan dan penawaran uang semata-mata untuk kepentingan sektor riil. Sehingga keseimbangan di pasar uang dan modal merupakan cermin dari keseimbangan pasar barang dan jasa. Ciri yang kedua berkaitan dengan upaya untuk mengatasi masalah inflasi yang lazim ditemui dalam sistem ekonomi konvensional, dengan cara memperbanyak pembiayaan dengan menggunakan akad *profit and loss sharing*. Kemudian ciri yang ketiga penggunaan mata uang yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya, ini ditemukan dalam mata uang dinar dan dirham.

Catatan akhir:

¹ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 63-65.

² Budi Mulya, "Transparansi Kebijakan Moneter", *Republika*, (10 November 2006).

³ Chaikal Nuryakin, "Kutukan Krisis dan Dosa Asal Instrumen Keuangan", *Republika*, (15 Oktober 2008).

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Bachrul Ilmi, "Saatnya Era Keuangan Syariah", *Republika*, (16 Oktober 2008).

-
- ⁶ “Menuju Sistem Moneter Islami”, *Sharing*, (Edisi 30 Thn III Juni 2009).
- ⁷ *Ibid*.
- ⁸ Sofyan S. Harahap, “Ekonomi Syariah, Bretton Woods, KITT ASEM, dan AS”, *Republika*, (3 November 2008).
- ⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 29.
- ¹⁰ *Ibid*.
- ¹¹ Merza Gamal, “Perspektif Uang Islami”, dalam <http://www.ekonomisyariah.net>. 17 November 2006.
- ¹² Ikhwan Abidin Basri, “Uang Sebagai Alat Tukar Di Mata Imam Al-Ghazali”, *Republika*, (10 Maret 2003).
- ¹³ Khairunnisa Musari, “Rentannya Sistem Moneter Kita”, *Republika*, (29 September 2008).
- ¹⁴ M. Bachrul Ilmi, “Runtuhnya Konvensional, Bangkitnya Keuangan Syariah”, *Republika*, (16 Oktober 2008).
- ¹⁵ *Ibid*.
- ¹⁶ Adiwarmarman A Karim, “Ma’kud Alaih Keuangan Global”, *Republika*, (3 November 2008).
- ¹⁷ *Sharing, loc. cit.*
- ¹⁸ T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et al, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 445-446.
- ¹⁹ *Ibid*, h. 88.
- ²⁰ Handi R. Idris, “OKI, IDB Bertindaklah”, *Republika*, (3 November 2008).
- ²¹ Handi R. Idris, “Emas dan Perdagangan Internasional Negara Islam”, *Republika*, (15 Desember 2003).
- ²² Mustafa Edwin Nasution, *et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 90.
- ²³ *Ibid*, hal. 247.
- ²⁴ Hendro Wibowo, “Penerapan Dinar dan Dirham Solusi dalam Sistem Moneter di Indonesia Tinjauan Perspektif Islam”, dalam www.iaecipusat.org.
- ²⁵ “Saat Dinar Didaulat Jadi Alat Transaksi Alternatif”, *Republika*, (26 Januari 2007).
- ²⁶ Handi R. Idris, “OKI, IDB Bertindaklah”, *loc.cit.*

DAFTAR PUSTAKA

- “Saat Dinar Didaulat Jadi Alat Transaksi Alternatif”, *Republika*, (26 Januari 2007).
- “Menuju Sistem Moneter Islami”, *Sharing*, (Edisi 30 Thn III Juni 2009).

Basri, Ikhwan Abidin, "Uang Sebagai Alat Tukar Di Mata Imam Al-Ghazali", *Republika*, (10 Maret 2003).

Gamal, Merza, "Perspektif Uang Islami", dalam <http://www.ekonomisyariah.net>. 17 November 2006.

Harahap, Sofyan S. "Ekonomi Syariah, Bretton Woods, KTT ASEM, dan AS", *Republika*, (3 November 2008).

Idris, Handi R., "OKI, IDB Bertindaklah", *Republika*, (3 November 2008).

-----, "Emas dan Perdagangan Internasional Negara Islam", *Republika*, (15 Desember 2003).

Ilmi, M. Bachrul, "Saatnya Era Keuangan Syariah", *Republika*, (16 Oktober 2008).

-----, "Runtuhnya Konvensional, Bangkitnya Keuangan Syariah", *Republika*, (16 Oktober 2008).

Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

-----, "Ma'kud Alaih Keuangan Global", *Republika*, (3 November 2008).

Mulya, Budi, "Transparansi Kebijakan Moneter", *Republika*, (10 November 2006).

Musari, Khairunnisa, "Rentannya Sistem Moneter Kita", *Republika*, (29 September 2008).

Nasution, Mustafa Edwin, *et al*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nuryakin, Chaikal, "Kutukan Krisis dan Dosa Asal Instrumen Keuangan", *Republika*, (15 Oktober 2008).

Pohan, Aulia, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Wibowo, Hendro, “Penerapan Dinar dan Dirham Solusi dalam Sistem Moneter di Indonesia Tinjauan Perspektif Islam”, dalam www.iaecipusat.org.